

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (SIPKD), KOMPETENSI SUMBER DAYA
APARATUR (SDA), DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD) PROVINSI BALI**

**I Putu Rai Nadi Arta¹
Komang Fridagustina Adnantara²
Ni Made Ernila Junipisa³**

Universitas Triatma Mulya^{1,2,3}
Corresponding author: rainadiarta99@gmail.com

ABSTRACT

The Regional Government Financial Report is a Financial Report consisting of several SKPD Financial Reports submitted by the Regional Government through the Regional Secretary to the Regional Head and DPRD in order to account for the implementation of the APBD and regional government fiscal policy making. Based on the Audit Results Report on the Bali Provincial Government's Financial Reports carried out by the Bali Provincial Representative Financial Audit Agency for the last five years, it is stated that the Bali Provincial Government's Financial Reports received a WTP Opinion, however there are several notes that the Bali Provincial Government must pay attention to when preparing the Financial Reports. Regional Government the following year. This study aims to determine the effect of the Implementation of the Regional Financial Management Information System (SIPKD), the Competence of Apparatus Resources (SDA), and the Implementation of the Government Internal Control System (SPIP) on the Quality of Regional Government Financial Reports (LKPD) of Bali Province. The population used in this study were all Civil Servants (PNS) who worked in the Finance section of the Bali Provincial Government. The sample in this study were 116 respondents who were determined based on the purposive sampling method. The data used in this study is primary data, namely the survey method using a questionnaire. The analytical tool used is multiple linear regression. The results of the study show that the application of the Regional Financial Management Information System (SIPKD), the Competence of Apparatus Resources (SDA), and the Implementation of the Government Internal Control System (SPIP) have a positive effect on the Quality of Regional Government Financial Reports (LKPD) of Bali Province.

Keywords: Quality of LKPD, Implementation of SIPKD, Competence of Apparatus Resources, Implementation of SPIP

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Bali merupakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), salah satunya adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali (BPKAD Provinsi Bali). BPKAD Provinsi Bali menjalankan peran sebagai entitas akuntansi dan entitas

pelaporan, sehingga BPKAD Provinsi Bali menyusun serta menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Kepala Daerah dan DPRD, LKPD tersebut terdiri dari beberapa

Laporan Keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang di konsolidasikan. Laporan Keuangan tersebut ditelaah oleh APIP atau Inspektorat Daerah sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah dan DPRD, selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dan mendapatkan opini dari BPK RI.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu LHP LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017 Nomor: 10.B/LHP/XIX.DPS/05/2018, tanggal 28 Mei 2018, LHP LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018 Nomor: 20.B/LHP/XIX.DPS/05/2019, tanggal 24 Mei 2019, LHP LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 Nomor: 70.B/LHP/XIX.DPS/05/2020, tanggal 27 Mei 2020, LHP LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 Nomor: 64.B/LHP/XIX.DPS/05/2021, tanggal 17 Mei 2021, dan yang terakhir LHP LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 Nomor: 65.B/LHP/XIX.DPS/05/2022, tanggal 13 Mei 2022, Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, namun Opini WTP tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik, mengingat masih terdapat beberapa catatan/permasalahan atau temuan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali untuk penyusunan LKPD Tahun Anggaran berikutnya. Selain itu, pandemi COVID-19 pada tahun anggaran 2020 dan 2021 menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Bali, dengan

adanya berbagai perubahan peraturan dan ketentuan dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan LKPD Provinsi Bali.

SIPKD merupakan aplikasi terintegrasi yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang digunakan sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas berbagai peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran hingga pelaporan (Dewi dan Mimba, 2014).

Sumber Daya Aparatur (SDA) yang Berkualitas diperlukan untuk memaksimalkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), di samping kemajuan teknologi informasi dan sistem yang efektif, akuntabel, dan relevan, sumber Daya Aparatur (SDA) yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi, dapat menyusun laporan keuangan dengan lebih cepat dan cermat, sehingga laporan keuangan menjadi relevan dan penyusunan laporan keuangan dilakukan menggunakan bahasa akuntansi yang mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan (Mulyono, 2016).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kegiatan pengendalian yang melakukan penilaian secara mandiri terhadap bagaimana instansi pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya (Aditya dan Surjono, 2017). SPIP merupakan suatu proses tindakan dan kegiatan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh manajemen dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, (PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP).

Menurut Yosefrinaldi (2013), Dewi dan Mimba (2014), penerapan

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sedangkan Winarni dkk. (2020) menemukan bahwa secara parsial penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIPKD) tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Evicahyani dan Setiawina (2016) melakukan penelitian serupa dan menemukan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, namun Latifah (2017) menemukan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Aditya dan Surjono (2017) menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sedangkan Asysyihatul Latifah (2017) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa Penerapan SIPKD, Kompetensi Sumber Daya Alam, dan Penerapan SPIP sangat penting terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali, sehingga diperlukan untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi kualitas LKPD. maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Kompetensi Sumber Daya Aparatur (SDA), Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Provinsi Bali”

II. KAJIAN PUSTAKA

***Signalling Theory* (Teori Sinyal)**

Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), perusahaan yang memisahkan fungsi kepemilikan dan manajemen rentan terhadap konflik keagenan. Model keagenan diartikan sebagai dua pihak, pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), yang mengadakan perjanjian (kontrak) untuk mencapai hasil yang diinginkan (Maulana, Aditya 2017). Hubungan keagenan ini tidak hanya terjadi di sektor swasta atau bisnis nirlaba, namun juga terjadi di pemerintahan, dimana pemerintah bertindak sebagai pengelola (*agent*) dan DPR/DPRD bertindak sebagai pemilik (*principal*) (Maulana, Aditya 2017).

Permasalahan keagenan muncul akibat adanya persaingan kepentingan antara pemerintah daerah (*agent*) dan DPR/DPRD (*principal*). DPR berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas dari pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas pelaksanaan APBD dan kewenangan pengambilan keputusan yang telah diberikan (Karsana dan Suaryana, 2017).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah sepanjang masa (Pasal 1 No. 1 PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan pemerintah yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Kelebihan Saldo Anggaran

(Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Keuangan Laporan (CaLK) merupakan komponen utama Laporan Keuangan Pemerintah, sesuai PP no. 71 Tahun 2010.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

SIPKD merupakan aplikasi terintegrasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah (Dewi dan Mimba, 2014). Penerapan SIPKD juga merupakan wujud nyata upaya fasilitasi Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan, dengan tujuan untuk meningkatkan persepsi bersama terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam menafsirkan dan melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan.

Sumber Daya Aparatur (SDA)

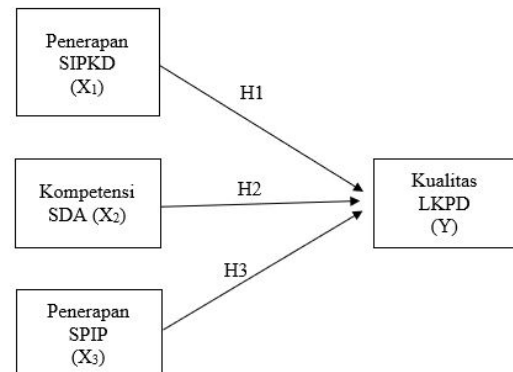
Menurut Andini dan Yusrawati 2021, Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah mengacu pada kualitas yang harus dimiliki oleh seorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas kedinasan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengendalian internal merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh manajemen dan seluruh pegawai guna menciptakan keyakinan yang tepat terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui operasional yang efektif dan efisien. Pengendalian intern yang baik akan

meningkatkan kinerja pemerintah sehingga dapat memenuhi seluruh tujuannya sehingga memudahkan tercapainya keterbukaan di lingkungan pemerintahan. Semakin besar pengendalian internal suatu entitas, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangannya, karena segala sesuatunya dapat diperiksa untuk memastikan tidak menyimpang dari kriteria yang telah ditetapkan (Karsana dan Suaryana, 2017). Menurut penelitian Mulyani dan Suryawati (2013), Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang dikembangkan untuk membantu upaya agar operasional pada instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif.

Adapun model atau rancangan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1

Rancangan Penelitian

Hipotesis

1) Pengaruh Penerapan SIPKD

Terhadap Kualitas LKPD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan pemerintah yaitu PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2019). LKPD hendaknya dikembangkan dengan

menggunakan aplikasi yang memadai, efektif, dan efisien yaitu aplikasi SIPKD, sehingga SIPKD secara tidak langsung akan mencerminkan kualitas LKPD khususnya di Pemerintah Provinsi Bali, karena jika SIPKD berjalan efektif, fleksibel, dan efisien, akurat dalam menyajikan data atau informasi, dan mudah dipahami, hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas LKPD itu sendiri. Menurut Dewi dan Mimba (2014), Penerapan SIPKD di Pemerintah Kota Denpasar berpengaruh besar terhadap kualitas LKPD Kota Denpasar, dan menurut Mulyono (2016), penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIPKD) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Atas dasar tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Provinsi Bali

2) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Aparatur Terhadap Kualitas LKPD

Pada umumnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur (SDA) dapat dipergunakan untuk mengukur kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) karena pada dasarnya jika Aparatur pada pemerintah daerah kompeten, dalam hal ini menduduki jabatan sesuai dengan pendidikan, memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan mempengaruhi kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut. Dalam

penelitian yang dilakukan Mulyono (2016), memperoleh hasil bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian serupa yang dilakukan Karsana dan Suaryana, (2017), juga memperoleh hasil bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia terbukti berpengaruh positif pada kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kompetensi Sumber Daya Aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Provinsi Bali.

- 3) Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas LKPD
- SPIP merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dengan adanya penerapan SPIP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas dari LKPD khususnya di Pemerintah Provinsi Bali. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aditya dan Surjono (2017), membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian serupa yang dilakukan Karsana dan Suaryana, (2017), membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangli. Berdasarkan

penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H₃ : Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Provinsi Bali.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan kuisioner, serta dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam teknik penentuan sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda untuk mengambil kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di bagian Keuangan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali yaitu berjumlah 417 Orang. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditentukan (Sugiyono, 2019:127), Kriteria yang ditentukan pada penelitian ini adalah para Admin SIPKD, PNS dengan Jabatan Bendahara Pengeluaran, PNS dengan Jabatan Urusan Akuntansi dan Pelaporan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) yang memiliki masa kerja diatas 1 (satu) tahun dan yang terlibat langsung dalam penginputan ke sistem SIPKD di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yaitu berjumlah 29 (Dua puluh sembilan) SKPD. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi

linear berganda. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) yang terdiri dari: uji statistik deskriptif, Uji Instrumen, Uji Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F), Uji Hipotesis (Uji Statistik t), Koefisien Determinan (Adjusted R²). Persamaan regresi linier berganda pada model penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y	= Kualitas LKPD
α	= Bilangan konstanta
$b_1, b_2, b_3,$	= koefisien regresi
X ₁	= Penerapan SIPKD
X ₂	= Kompetensi SDA
X ₃	= Penerapan SPIP
e	= Error

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu, Penerapan SIPKD, Kompetensi SDA dan Penerapan SPIP terhadap variabel dependen yaitu Kualitas LKPD Provinsi Bali. Hasil dari Analisis Regresi Linier Berganda dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.385	.145		9.523	.000		
SIPKD	.131	.052	.192	2.540	.012	.568	1.762
SDA	.261	.083	.362	3.161	.002	.247	4.052
SPIP	.228	.077	.323	2.958	.004	.271	3.686

a. Dependent Variable: LKPD

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 6 tersebut, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
 K.LKPD = 1,385 + 0,131 P.SIPKD + 0,261 K.SDA + 0,228 S.SPIP + e
 Persamaan tersebut dapat diartikan

sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (α) sebesar 1,385 dapat diartikan bahwa Kualitas LKPD Provinsi Bali akan bernilai sebesar 1,385 apabila variabel Penerapan SIPKD, Kompetensi SDA, dan Penerapan SPIP nilainya sama dengan nol (0).
- 2) Penerapan SIPKD mempunyai pengaruh yang positif sebesar 0,131 terhadap Kualitas LKPD, apabila Penerapan SIPKD dinaikan satu satuan maka Kualitas LKPD akan meningkat sebesar 0,131 satuan dengan asumsi variabel dependen lainnya konstan.
- 3) Kompetensi SDA mempunyai pengaruh yang positif sebesar 0,261 terhadap Kualitas LKPD Provinsi Bali, apabila Kompetensi SDA dinaikan satu satuan maka Kualitas LKPD Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,261 satuan dengan asumsi variabel dependen lainnya konstan.
- 4) Penerapan SPIP mempunyai pengaruh yang positif sebesar 0,228 terhadap Kualitas LKPD Provinsi Bali, apabila Tingkat Penerapan SPIP dinaikan satu satuan maka Kualitas LKPD Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,228 satuan dengan asumsi variabel dependen lainnya konstan.

Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Berdasarkan hasil Tabel 1 sebelumnya, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Variabel Penerapan SIPKD memiliki nilai t hitung sebesar 2,540 dengan nilai signifikansi yaitu 0,012 yang berarti lebih kecil dari 0,05 (signifikan). Sehingga H_1 yaitu Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD diterima.
- 2) Variabel Kompetensi SDA memiliki nilai t hitung sebesar

3,161 dengan nilai signifikansi yaitu 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05 (signifikan). Sehingga H_2 yaitu Kompetensi Sumber Daya Aparatur (SDA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD diterima.

- 3) Variabel Penerapan SPIP memiliki nilai t hitung sebesar 2,958 dengan nilai signifikansi yaitu 0,004 yang berarti lebih kecil dari 0,05 (signifikan). Sehingga H_3 yaitu Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji Uji Koefisien Determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2

Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.798 ^a	.637	.627	.256

a. Predictors: (Constant), SPIP, SIPKD, SDA

b. Dependent Variable: LKPD

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa kontribusi besarnya pengaruh Penerapan SIPKD, Kompetensi SDA, dan Penerapan SPIP terhadap Kualitas LKPD Provinsi Bali sebesar 62,7 persen dan sisanya sebesar 37,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun pembahasan hasil penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

1) Pengaruh Penerapan SIPKD terhadap Kualitas LKPD Provinsi Bali

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel Penerapan SIPKD memiliki nilai t sebesar 2,540 dengan nilai signifikansi yaitu 0,012 yang berarti lebih kecil dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan SIPKD berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD Provinsi Bali, sehingga H_1 diterima. Artinya, jika Penerapan SIPKD meningkat, maka Kualitas LKPD Provinsi Bali juga akan meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan SIPKD mampu mendukung pengelolaan keuangan baik dari segi penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan serta dapat memberi manfaat yang besar bagi masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yaitu dengan terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan (Suryaningrat dan Utama, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013), Mulyono (2016), Dewi dan Mimba (2014) yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2) Pengaruh Kompetensi SDA terhadap Kualitas LKPD Provinsi Bali

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel Kompetensi SDA memiliki nilai t sebesar 3,161 dengan nilai signifikansi yaitu 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi SDA berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD Provinsi Bali, sehingga H_2 diterima. Dimana Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memiliki kompetensi yang lebih/tinggi memungkinkan untuk memberikan kontribusi yang besar dalam penyusunan LKPD agar terciptanya LKPD yang berkualitas,

efektif, efisien, dan akuntabel. Dimana Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memiliki kompetensi yang lebih/tinggi memungkinkan untuk memberikan kontribusi yang besar dalam penyusunan LKPD agar terciptanya LKPD yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel. Dan dapat juga diartikan bahwa Kompetensi Sumber Daya Aparatur (SDA) memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan LKPD, mengingat dalam mengaplikasikan SIPKD diperlukan kompetensi dari Aparatur itu sendiri. Jadi semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur dilihat dari kemampuan dan keterampilannya maka semakin berkualitas LKPD yang di susun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evicahyani dan Setiawina (2016), Mulyono (2016), Karsana dan Suaryana, (2017) yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Aparatur (SDA) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

3) Pengaruh Penerapan SPIP terhadap Kualitas LKPD Provinsi Bali

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel Penerapan SPIP memiliki nilai t sebesar 2,958 dengan nilai signifikansi yaitu 0,004 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD Provinsi Bali, sehingga H_3 diterima. Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan dapat memenuhi karakteristik/nilai informasi yang

disyaratkan untuk terciptanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas yang akan mendapatkan opini yang baik atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dapat diartikan juga bahwa Penerapan SPIP memiliki peran yang penting terhadap penyusunan LKPD, karena dalam penyusunan LKPD tidak terlepas dari aturan-aturan serta monitoring dan pengawasan yang diterapkan agar terciptanya LKPD yang berkualitas. Jadi semakin tinggi SPIP yang diterapkan maka semakin berkualitas LKPD tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditya dan Surjono (2017), Untary dan Ardiyanto (2015) yang menyatakan bahwa Penerapan SPIP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

- 1) Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Provinsi Bali. Hal ini berarti jika Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintah Provinsi Bali semakin meningkat maka LKPD Provinsi Bali akan semakin berkualitas.
- 2) Kompetensi Sumber Daya Aparatur (SDA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Provinsi Bali. Hal ini berarti jika Sumber Daya Aparatur (SDA) yang menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pengelola keuangan memiliki

Kompetensi yang semakin baik dan kompeten maka kualitas dari LKPD Provinsi Bali akan semakin Berkualitas.

- 3) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Provinsi Bali. Hal ini berarti jika Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) semakin baik, maka LKPD Provinsi Bali akan semakin berkualitas.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta simpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diajukan yaitu sebagai berikut.

- 1) Bagi Pemerintah Provinsi Bali, hendaknya terus melakukan perbaikan sistem terhadap aplikasi SIPKD seperti pemeliharaan server yang akan meminimalisir terjadinya eror pada aplikasi dan data yang ada di dalam server tetap aman, serta meningkatkan kecepatan internet untuk menjaga kestabilan pengoprasian aplikasi SIPKD, sehingga kelemahan-kelemahan yang di temukan pada sistem bisa diatasi. Tetap melakukan sosialisasi terkait dengan aturan-aturan mengenai SPIP dan terus mengupdate kebijakan-kebijakan terbaru sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, memperbanyak sosialisasi terkait dengan aturan mengenai pengelolaan keuangan daerah, pengaplikasian sistem informasi dalam teknologi, serta tingkat kompetensi sesuai jabatan yang diampu, dan dalam penyusunan LKPD Provinsi Bali diharapkan selalu meningkatkan koordinasi antar SKPD, karena dengan adanya peningkatan koordinasi antar SKPD akan memperkecil terjadinya kesalahan baik itu kesalahan pengakuan, kesalahan koreksi,

ataupun kesalahan-kesalahan yang bisa berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemeriksaan tahun berikutnya..

- 2) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambah variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Variabel lain yang dimaksud seperti sosialisasi aturan mengenai SPIP, atau aturan mengenai pengelolaan keuangan daerah, pengetahuan sistem informasi dalam teknologi, tingkat kompetensi sesuai jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Oka Reza dan Surjono, Welly. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan). Jurnal SIKAP, Vol 2 (No. 1), 2017, hal 49-62 p-ISSN: 2541-1691.
- Andini, Dewi dan Yusrawati. 2021. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Kiat Vol. 26, No. 1 (2015), Hal. 33-41
- Badan Pemeriksa Keuangan RI.2018. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor10.B/LHP/XIX.DPS/05/2018. tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2017.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI.2019. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 20.B/LHP/XIX.DPS/05/2019. tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI.2020. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 70.B/LHP/XIX.DPS/05/2020. tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI.2021. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 64.B/LHP/XIX.DPS/05/2021. tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI.2022. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 65.B/LHP/XIX.DPS/05/2022. tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021
- Dewi dan Mimba. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kota Denpasar). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 8.3(2014):442-457
- Evicahyani, Sagung Inten dan Setiawina, Nyoman Djinar. 2016. Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.3 (2016) : 403-428.
- Karsana, I Wayan dan Suaryana, I Gusti Ngurah Agung. 2017. Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan

- Pemerintah Kabupaten Bangli. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.1. Oktober (2017): 643-670, ISSN: 2302-8556
- Latifah, Asysyihatul. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bantul).
- Maulana dan Aditya. 2017. Pengaruh Kompetensi Auditor APIP, Komitmen Pada Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Reviu LKPD Serta Pengaruh Kualitas Reviu LKPD Terhadap Kualitas LKPD Di Wilayah Eks Karesidenan Malang.
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. 2013. Analisis Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3.P/PP No. 60 Tahun 2008) dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Organisasi dan Manajemen, 13(5), pp: 102-116.
- Mulyono, Febrianto Eka Putra. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada SKPD wilayah Depok)
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryaningrat, A.A.Ayu Mas dan Utama, I Made Suyana. 2018. Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Pemerintah Provinsi Bali. Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Vol. 23 No. 1, Februari 2018
- Untary, N.R. dan Ardiyanto, Moh Didik. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Faktor Eksternal sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang). Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 4(2015). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/15502/144>
- www.kemendagri.go.id, diakses pada tanggal 13 September 2022